

BAB III

PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN

Bab-bab terdahulu telah menguraikan sumber-sumber kekayaan materiil dan tak materiil Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan nasional, peranan pelbagai sektor yang kait-mengait dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, serta kemungkinan-kemungkinan tentang sumbangan pendidikan kepada berbagai sektor pembangunan. Analisa masalah-masalah pembangunan serta pengakuan adanya kekuatan-kekuatan penghambat pembangunan yang bersumber pada pola kebudayaan masyarakat tradisional Indonesia telah membawa kepada pertimbangan bahwa manusia, selaku subjek dan pelaku pembangunan, menduduki tempat yang sentral dalam proses pembangunan. Ini menyarankan pentingnya pengembangan sumber-sumber manusia sebagai prakondisi pembangunan melalui pendidikan.

Bab ini hendak menjajagi peranan-peranan pendidikan dalam pembangunan nasional serta implikasi-implikasinya bagi kebijaksanaan nasional dibidang pendidikan dan bagi administrasi pendidikan. Berbicara tentang pembangunan nasional adalah berbicara tentang proses pengembangan sistem sosialnya, ekonominya, dan sistem politiknya. Oleh karena itu peranan pendidikan dalam pembangunan nasional akan dianalisa dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, dan politik daripada proses pembangunan.

Pertimbangan-pertimbangan tentang peranan pendidikan dalam dimensi-dimensi pokok pembangunan adalah kerangka yang logis bagi suatu analisa tentang pemba-

ruan pendidikan, jika pendidikan hendak mendukung pembangunan. Bukan maksud Bab ini untuk mengetengahkan suatu strategi umum tentang pembaruan pendidikan; ia hanyalah hendak mendekati masalah pembaruan pendidikan dari suatu perspektif yang lebih luas, dan melalui ini mendekati peranan administrasi pendidikan dalam pengembangan dan penyempurnaan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tidaklah mungkin untuk menceraikan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik suatu bangsa. Satu-satunya manfaat menceraikan proses-proses sosial dari ekonomi dari politik itu ialah bahwa ia memudahkan pengolahannya untuk maksud-maksud analisa dan untuk pemahaman proses-proses yang kompleks. Akan tetapi jelas bahwa setiap satuan analisa yang dipilih itu adalah bagian dari suatu sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap satuan analisa lainnya.

A. Pengembangan Sumber Manusia Dan Pembangunan

Dalam arti yang umum, pembangunan sumber manusia adalah proses pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, kemampuan bekerja, dan kesanggupan bawaan dari segenap penduduk dalam suatu masyarakat. Akumulasi persediaan pengetahuan, kecakapan, dan kesanggupan manusia ini dapat dipandang suatu bentuk kekayaan atau modal dan, karenanya, pengembangan sumber manusia itu merupakan "investasi dalam manusia."¹ Jelas, suatu bangsa dengan penduduk yang terdidik sangat baik dan dengan persediaan pengetahuan teknologi

¹ Baca T.W. Schultz, "Investment in Human Capital" dalam M. Blau (ed.), Education I (Baltimore: Penguin Books, 1964), p. 13-31; dan Frederick Harbison, "Human Capital and Development" dalam Economic and Social Aspects of Educational Planning (Paris: Unesco, 1969), p. 59-68.

dan kecakapan-kecakapan yang sangat besar, memiliki jenis kekayaan yang tidak dimiliki dalam jumlah yang sama oleh suatu negara yang sedang mengejar kemajuan. Jadi dalam kata akhir, kekayaan suatu bangsa bergantung pada kekuatannya untuk memperkembangkan dan menggunakan secara efektif kesanggupan bawaan penduduknya. Kata Harbison:

Progress is basically the result of human effort. It takes human agents to mobilize capital, to exploit natural resources, to create markets, and to carry on trade. The builders of economics are elites of various kinds who organize and lead the march toward progress. ... Their effectiveness as prime movers depends not only on their own development but on the knowledge, skills, and capabilities of those whom they lead as well. Thus, in a very real sense the wealth of a nation and its potential for social, economic, and political growth stem from the power to develop and effectively utilize the innate capacities of people.¹

Indonesia dikaruniai Tuhan sumber-sumber alam yang diduga melimpah. Iklim tropis yang mendukung kesuburan tanah, dan kondisi geografi, yang dilihat dari sudut perdagangan dan hubungan politik dengan negara-negara lain, sangat menguntungkan. Karenanya beralasan untuk memandang kemiskinan kronis dari rakyatnya sebagai akibat dari kurangnya investasi dalam sumber manusianya, sehingga pengetahuan dan kecakapan-kecakapan penduduknya tak memadai untuk mengambil manfaat dari kemungkinan-kemungkinan yang terdapat dalam lingkungannya. Situasi ini bahkan akan mengakibatkan tertinggalnya bangsa Indonesia oleh negara-negara lain yang membuat investasi yang lebih cerdas dalam pembangunan sumber manusianya.

¹ F. Harbison and C.A. Myers, Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resource Development (New York: McGraw-Hill, 1964), p. 14.

B. Perhatian Baru Terhadap Pendidikan

Ada dua perkembangan penting yang terjadi sehabis Perang Dunia II yang mengakibatkan penilaian baru terhadap pendidikan serta pergeseran dalam perspektif mengenai hubungannya dengan ekonomi, masyarakat dan negara. Yang pertama ialah munculnya dalam jumlah besar negara-negara baru bekas koloni di Asia dan Afrika--kawasan-kawasan yang didiami oleh lebih dari setengah penduduk dunia. Keharusan untuk segera membangun pemerintahan lengkap dengan semua jenis jawatan dan dinas-dinasnya yang diisi dengan personil pribumi serta usaha-usaha dari negara-negara ini untuk mendobrak dan keluar dari kemiskinan, penyakit, dan daya produksi rendah telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendesak pada para perancang ekonomi tentang prioritas-prioritas yang harus ditetapkan untuk suatu strategi pembangunan yang berhasil. Maka pendidikan telah muncul dalam pikiran sebagai sarana pembangunan. Pendidikan dipandang sebagai urusan negara dan sekaligus sebagai hak individu. Hak atas pendidikan tumbuh dari ide-ide tentang demokrasi (setiap orang hendaknya memperoleh peluang untuk menjadi cerdas) dan dari tekanan yang diberikan oleh negara-negara berkembang kepada hak setiap warganya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian ide-ide tentang demokrasi menjadi terjalin dengan kepercayaan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan kepada hidup berguna dan produktif.

Yang kedua ialah kesadaran yang semakin tajam di negara-negara industri ketika mereka memasuki abad teknologi, bahwa sistem pendidikan adalah tulang punggung perkembangan lanjutnya sendiri. Lebih besar jumlah penduduk yang bersekolah dan terdidik baik, lebih besar lagi kemungkinan-kemungkinan kemajuan

industri, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan. Keinsyafan ini bertambah kuat setelah para ilmuwan memperlihatkan apa yang mereka dapat kerjakan selama dan sesudah Perang Dunia II. Kata Drucker:¹

The essential new fact is that a developed society and economy are less than fully effective if anyone is educated to less than the limit of his potential. The uneducated is fast becoming an economic liability and unproductive. Society must be an 'educated society' today--to progress, to grow, even to survive.

Dunia modern kini sedang mengalami revolusi pendidikan disebabkan karena "pengetahuan" tidak lagi tak produktif dalam pengertian barang dan jasa. Dalam masyarakat modern pengetahuan menjadi kekayaan yang benar-benar produktif. Orang yang bekerja melulu atau terutama dengan tangannya ialah orang yang semakin tak produktif. Pekerjaan produktif dalam masyarakat dan perekonomian modern ialah pekerjaan yang didasarkan pada akal dan bukan pada tangan. Pembentukan orang-orang terdidik, karenanya, pembentukan modal yang paling penting. Jumlahnya, mutunya, dan pemanfaatannya ialah penunjuk yang paling berarti tentang potensi ekonomi, militer, dan bahkan politik dari masyarakat modern. Berbicara tentang peranan penting dari pendidikan bagi ketahanan nasional suatu negara industri dalam persaingan antara negara-negara kuat, berkata Drucker:

The higher education of a country controls its military, its technological and its economic potential. In an age of superpowers and absolute weapons, higher education may indeed be the only area in which a country can still

¹ Peter F. Drucker, "The Educational Revolution," dalam Halsey, Floud, and Anderson (eds). Education, Economy, and Society (New York: The Free Press, 1961), p. 15.

be ahead, can still gain decisive advantage.

The greatest impact of the educational revolution is therefore on international power and politics. It has made the supply of highly educated people a decisive factor in the competition between powers--for leadership and perhaps for survival.

The conclusion from this is as simple as it is new: educational development becomes a priority of national policy.¹

Arti penting baru yang diberikan kepada pendidikan, jelas, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tentang faedahnya bagi bangsa dan negara. Pendidikan semakin diarahkan kepada tujuan-tujuan nasional. Dalam peranannya yang baru sebagai satu di antara "industri-industri" vital negara ia mengabdikan diri kepada "menghasilkan" tenaga manusia yang diperlukan untuk meningkatkan kesempatan bekerja, untuk mengurangi ketaksamaan dalam pendapatan penduduk terutama di lapisan bawah, untuk mempercepat perubahan sosial, dan untuk memajukan kedudukan bangsa dan negara di dunia yang bersaing. Maka pendidikan sekarang dipandang sebagai suatu kewajiban negara, karena ia adalah jembatan ke kemajuan dan kemakmuran bahkan survival. Pernyataan-pernyataan seperti "pendidikan adalah kunci modernisasi" atau "pendidikan adalah investasi dalam manusia" sekarang sedang memperoleh pengakuan sebagai kebenaran di kalangan para pemimpin negara yang sedang membangun, perancang-perancang kebijaksanaan, dan sarjana-sarjana yang menaruh minat pada proses modernisasi.

Munculnya pendidikan secara mendadak di wilayah hukum kebijaksanaan nasional tidak memecahkan masalah-

¹ Ibid., p. 21.

masalah pendidikan kita. Lebih tepat, ia telah mengemukakan masalah-masalah itu dalam bentuk-bentuk yang paling dasar dan membingungkan. Karena itu, dalam tahun-tahun mendatang konsep-konsep kita tentang pendidikan akan harus lebih tajam dari yang sudah-sudah, lebih berani dan lebih cerdas. Hanyalah jika kita memulai memikirkan isyu-isyu pokoknya kita akan mencapai kata sepakat tentang prioritas-prioritas untuk masa datang.

Untuk memahami pendidikan kita harus memahami lebih banyak dari sekedar masalah-masalah teknis tentang sekolah, atau kurikulum, atau guru, atau teknologi pendidikan. Tiap perbincangan tentang masalah-masalah teknis itu didasari oleh pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah hakikat manusia? Nilai-nilai apakah hendaknya membimbing kita dalam membentuk anak didik melalui pendidikan? Apakah semua manusia esensial sama, atau apakah mereka sungguh berbeda dalam kecerdasan dan karakter? Jika mereka betul-betul berlainan, bagaimanakah sistem pendidikan yang demokratis hendak menangani masalah ini? Apakah pendidikan hendaknya terdiri atas perkembangan dari dalam individu atau atas pembentukan dari luar? Apakah pengetahuan ilmiah satu-satunya sumber kebenaran yang dapat dipercaya bagi manusia modern? Jenis pendidikan apakah yang paling memenuhi kebutuhan-kebutuhan abad teknologi? Apakah ada celah dalam kebudayaan modern antara yang ilmiah dan teknis di satu pihak dan yang liberal dan humanistik di pihak lain? Jika demikian, tindakan apakah dapat diambil untuk mempertemukan kedua jalur pokok dalam kebudayaan modern itu? Dapatkah kita menemukan suatu "core of common learnings" untuk memperpadukan masyarakat ke dalam satu

kelompok yang bersaudara?

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dasar tentang pendidikan, yang tak terpisahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang dasar pula tentang politik, tentang etika, dan tentang hidup itu sendiri. Bukan hal kebetulan bahwa "perdebatan" tentang tujuan-tujuan, isi, dan metode-metode pendidikan yang menghangat kembali sejak tahun 1960-an¹ ditandingi oleh pengkajian kembali nilai-nilai mutakhir dan tujuan-tujuan nasional.² Banyak dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan dapat dijawab secara final. Tiap generasi, tiap negara, bahkan tiap masyarakat harus mencari jawaban-jawaban terhadap masalah-masalahnya sendiri dalam kata-kata nilai-nilai, cita-cita, dan aspirasi-aspirasi sendiri.

Perhatian baru terhadap pendidikan di negara-negara telah maju maupun di negara-negara berkembang itu telah menimbulkan gema akademis pada berbagai disiplin ilmiah, terutama ekonomi dan sosial. Literatur yang tumbuh pesat mengenai ekonomi pendidikan memba-

¹ Baca di antaranya C.W. Scott, C.M. Hill, and H.W. Burns (eds), The Great Debate. Our Schools in Crisis (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1959; H. Ehlers and G.C. Lee (eds), Crucial Issues in Education (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964); dan Jacques Maritain, Education at the Crossroads (New Haven: Yale University Press, 1960).

² Baca di antaranya Paul R. Hanna (ed), Education: An Instrument of National Goals (New York: McGraw-Hill, 1962); Robert M. Hutchins, The Learning Society (New York: Mentor Books Ltd., 1968); Edgar Faure et al, Learning To Be. The World of Education Today and Tomorrow (Paris: Unesco, 1972); dan Unesco, Education on the Move (Paris: OISE-Unesco, 1975).

has pertanyaan-pertanyaan seperti hubungan antara hasil pendidikan dengan pendapatan pada skala individual maupun nasional; kesanggupan sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan tenaga pekerja; bagian dari pendapatan nasional atau anggarannya yang hendaknya dibelanjakan untuk pendidikan; dan masalah pembiayaan pendidikan. Literatur tentang sosiologi pendidikan membahas hal-hal seperti kesanggupan sekolah untuk meneruskan kebudayaan dari generasi ke generasi dan untuk mempersiapkan orang-orang untuk berbagai peranan dalam masyarakat; pengaruh pendidikan terhadap mobilitas sosial dan vokasional; dan hubungan antara pendidikan sekolah dengan sikap dan motivasi orang perseorangan. Sedang literatur mengenai apa yang mungkin dapat disebut "politik pendidikan" memusatkan perhatiannya kepada pertanyaan-pertanyaan tentang peranan yang dapat dan benar-benar dijalankan oleh pendidikan dalam pembangunan politik; hubungan antara kebijaksanaan politik dengan proses pendidikan; dan hubungan antara pendidikan formal dengan pembentukan elite politik yang baru.

C. Hubungan Antara Pendidikan Dengan Perubahan Sosial-Ekonomi-Politik

Pendidikan dan Perubahan Sosial

Dalam artinya yang paling luas pendidikan mungkin dapat didefinisikan sebagai asimilasi kebudayaan dari sikap masyarakat serta penantihannya dari generasi

yang satu kepada yang lain. Warisan kebudayaan, jelas, membantu perpautan masyarakat dan mendorong ke arah pengawetan kebudayaan. Fungsi pendidikan selaku pengawet kebudayaan yang ekstrim terdapat pada masyarakat primitif. Dalam masyarakat primitif, seperti dilukiskan secara stereotip oleh deskripsi antropologis, warisan sosial itu sangat minimal dan tidak berubah. Hidup didasarkan pada teknologi yang sederhana dan sesuai dengan itu ada pembagian pekerjaan yang sederhana dengan peranan-peranan menurut umur dan kelamin. Belajar sangat dikaitkan dengan masa kanak-kanak dan berakhir dengan akhir balig, dan transisi kepada status dewasa sering ditegaskan secara sosial dengan upacara-upacara dan larangan-larangan.¹ Kebudayaan dipindahkan melalui sistem kekerabatan. Isi pendidikan adalah identik dengan kebudayaan--unsur-unsur teknologinya maupun moral dan estetikanya. Hidup kulturil masyarakat serupa itu barangkali dapat dipandang sebagai suatu siklus generasi-generasi yang berulang. Tiga sifat pendidikan di masyarakat modern yang memiliki potensi untuk perubahan, yaitu spesialisasinya, penyebarannya yang tidak merata, dan alokasi sumber-sumbernya bagi penelitian ilmiah, tidak hadir dalam masyarakat primitif.

Masyarakat modern ditandai oleh kondisi-kondisi yang sebaliknya. Warisan sosial adalah rumit dan, karena penelitian dilembagakan, ia mengubah dirinya sendiri. Hidup didasarkan pada teknologi yang kompleks dengan pembagian pekerjaan yang sama kompleks-

¹ Baca di antaranya Ruth Benedict, Patterns of Culture (Boston: Houghton Mifflin Co., 1934); dan Yehudi A. Cohen, The Transition from Childhood to Adolescence (Chicago: Aldine Publishing Co., 1964).

nya. Belajar berlangsung terus sampai hidup dewasa. Ada organisasi-organisasi pendidikan formil yang di-khususkan di mana unsur-unsur kognitif dari kebudaya-an ditekankan lebih daripada unsur-unsur moralnya. Pendidikan di atas tingkat-tingkat rendah dan mene-ngah ditujukan pada menghasilkan spesialis-spesialis, dan masyarakat bergantung pada koordinasi pekerjaan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hanya bagi-an yang sangat kecil saja dari keseluruhan kebudaya-an. Pendidikan menjadi pelaku seleksi yang sentral bagi penyebaran peluang-peluang hidup.

Di dalam sistem pendidikan pengetahuan berubah te-rus. Penelitian menjadi fungsi pendidikan tinggi yang semakin penting. Perubahan kulturil dan bukan stabi-litas menjadi ukuran; dan tekanan pendidikan berge-ser ke arah inovasi dan penyebaran pengetahuan baru. Pengawetan kebudayaan, sudah tentu, tidak dikesamping-kan, tapi cara-cara adaptasi yang lama ditempatkan se-cara terus-menerus di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan yang menguraikan segala hal menurut akal dari kebuda-yaan yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan. Kondisi i-ni, tak dapat tidak, membawa kepada perubahan sosi-al. Dengan demikian, fungsi tradisional dari pendidik-an dengan proses transmisi kebudayaan dilaksanakan de-ngan syarat-syarat baru di bawah kondisi masyarakat teknologi. Fungsi pendidikan bukan lagi meneruskan pe-ngetahuan dan kepercayaan yang tak berubah atau lam-bat berubah. Sebaliknya, pendidikan dalam masyarakat modern lebih berurusan dengan mengubah pengetahuan da-ripada dengan mengawetkannya, dan lebih berurusan de-ngan menyebarkan kebudayaan kepada lingkungan sosial yang lebih luas, atau dari masyarakat yang satu kepada yang lain daripada dengan mengawetkan dan memindahkan

kebudayaan tertentu dari suatu kelompok tertentu.

Dua sketsa yang stereotip tentang peranan pendidikan dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern ini sebenarnya hanyalah suatu karangan. Kedua tipe itu dalam praktek tidak ada. Masyarakat yang sebenarnya hanya menyerupai yang satu atau yang lainnya. Dalam kenyataan, dalam masyarakat-masyarakat kini, walaupun tugas-tugas pendidikan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang dikhususkan yang bekerja sebagai variabel-variabel yang relatif berdiri sendiri dalam jalannya sistem sosial, sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi bisa memajukan atau menghalangi perubahan, dan menimbulkan akibat fungsional atau dis-fungsional yang tidak disengaja maupun yang disengaja.¹

Pendidikan dan mobilitas sosial

Satu di antara aspek-aspek perubahan sosial yang paling penting dalam proses modernisasi adalah mobilitas sosial vertikal yang bertalian dengan itu. Gerakan naik pada skala status sosio-ekonomi adalah bertalian dengan pendidikan. Ketiga variabel--mobilitas sosial, perubahan sosial, dan pendidikan--seperti telah diungkapkan oleh penelitian-penelitian sosiologis--adalah satu sama lain berhubungan erat sekali,² walaupun

¹ Baca Carlos Delgado, "Education Today - Block Change in Latin America," dalam *Education on the Move*, op.cit., p. 28-30.

² Literatur tentang hubungan antara pendidikan dengan perubahan sosial meliputi di antaranya: A.H. Halsey, J. Floud, and C.A. Anderson (eds), Education, Economy, and Society (New York: The Free Press, 1961); C.H. Gross, S.P. Wronski, and J.W. Hanson, School and Society (Boston: Heath and Co., 1962); Willard Waller, The Sociology of Teaching (New York: John Wiley & Sons,

di antara para ahli sosiologi tidak tercapai perseusuan pendapat.¹

Proses industrialisasi di negara-negara Barat (yang dimulai dengan Inggris pada abad ke-19 dan kemudian meluas ke negara-negara lain) melibatkan perpindahan penduduk dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota, perubahan dalam penyebaran pekerjaan penduduk, dan peningkatan dalam produktivitas ekonomi dan dalam pendapatan per kapita. Perubahan-perubahan sosial ini telah menciptakan dan memperbesar "kelas menengah baru" yang terdiri dari orang-orang yang berpendidikan sangat baik--para ahli kimia, insinyur, dokter, administrator, guru, dokter, dan pegawai kantor. Jadi, terdapat tidak, gerakan mobilitas ke atas dalam kedudukan-kedudukan baru ini harus terjadi.

Dalam masyarakat industri, terdapat perbedaan, sistem pendidikan harus memelihara hubungan yang sangat erat dengan ekonomi. Teknologi industri modern, yang didasarkan pada tenaga listrik dan tenaga yang menggunakan bentuk-bentuk tenaga lain, telah menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan yang lebih kompleks, mengubah struktur ekonomi dari usaha, dan perangsang produktivitas sosial para pekerja. Ia sangat bergantung pada hasil hasil

1965); C.A. Anderson, "The Impact of the Educational System on Technological Change and Modernization," dalam *Readings, op.cit.*, p. 901-13, ed. by Jer Freyf, "Education Development and Social Change in Indonesia," *Harvard Educational Review*, Vol. XXV No. 4, Fall 1954, p. 239-55; dan Herbert Hirsch, *Quality and Education in Japan* (New York: Teachers College, Columbia University, 1965).

¹ C.A. Anderson, "Adaptation to Change in Education and Mobility," dalam *op.cit.*, p. 911-12, ibid.

penelitian ilmiah, pada pengadaan tenaga kerja yang terampil dan bertanggungjawab, dan karenanya pada efisiensi dari sistem pendidikan.

Skala dan kerumitan yang meningkat dari unit produksi memperkuat pertumbuhan sektor tertier dari ekonomi atas kerugian sektor primer. Proporsi keseluruhan tenaga kerja yang aktif dalam produksi barang dan jasa merosot dari tahap industrialisasi sebelumnya; dan fungsi-fungsi birokrasi, administrasi, pemeliharaan, dan komunikasi tumbuh dengan memperbanyak bagian-bagian baru. Proporsi tenaga kerja yang aktif dalam pekerjaan tangan--terutama pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan--menurun. Permintaan akan personil kantor, profesional, dan managerial meningkat. Terutama permintaan akan sarjana-sarjana ilmu alam dan teknologi tumbuh. Teknologi baru, hasil penemuan mereka, mengintegrasikan tenaga kerja ke dalam suatu proses produksi mesin. Struktur produksi tradisional, dalam mana para tukang yang terampil bekerja di bawah pengawasan mandiri, terdesak oleh struktur yang lebih kompleks. Keterampilan bekerja yang diminta dari pekerja ditingkatkan dan didiferensiasikan.

Jadi, masyarakat industri modern berbeda dengan yang lain dalam struktur dan perkembangannya, terutama oleh pelembagaan inovasi--organisasi-organisasi penelitian ilmiah milik pemerintah dan swasta dalam ukuran yang semakin besar untuk meladeni pertumbuhan ekonomi. Struktur-struktur pekerjaannya adalah berbeda-beda secara khas, dengan kualifikasi pendidikan yang relatif tinggi untuk pekerjaan di semua tingkat, kecuali tingkat paling bawah. Pendidikan memperoleh arti ekonomi yang penting yang tak pernah terjadi se-

belumnya sebagai sumber inovasi teknologi; dan sistem pendidikan semakin diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja, yang bertindak selaku aparat pengerahan (recruitment) dan latihan calon pekerja. Kepada fungsi diferensiasi sosialnya yang tradisional telah ditambahkan fungsi seleksi sosial; ia harus memajukan elite-elite baru maupun memelihara yang lama. Selanjutnya, ia harus melayani kebutuhan-kebutuhan baru akan pendidikan dari massa penduduk, yang berasal dari status pekerja yang berubah dalam proses massa produksi yang modern.

Maka pendidikan menjadi suatu bentuk investasi yang pokok buat ekonomi secara keseluruhan, dan bentuk-bentuk pendidikan yang tua, mau tak mau, mengarah kepada maksud-maksud ekonomi modern. Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi bertambah dalam jumlah dan ruang lingkup. Proses pendemokrasian mempengaruhi mereka--kurikulum; seleksi pelajar dan pengadaan guru; struktur dan cara-cara lembaga bekerja; dan juga proses mengajar-belajar.

Pendidikan juga cenderung untuk mendorong mobilitas sosial secara tidak langsung. Sejumlah studi telah melaporkan bahwa pendidikan telah membawa pengaruh yang bermanfaat dalam menahan pertumbuhan penduduk. Studi-studi itu mengungkapkan adanya korelasi terbalik yang kuat antara tingkat pendidikan dan besar keluarga yang diinginkan atau yang sebenarnya, khususnya di antara wanita-wanita di berbagai negara pada semua tingkat pendapatan per kapita.¹ Walaupun interpretasi

¹ Lihat B.M. Russett et al., World Handbook of Political and Social Indicators (New Haven: Yale University Press, 1964).

... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
tem pendidikan, karena ekonomi masyarakat maju semakin dikuasai oleh inovasi ilmiah dan teknologis, menduduki tempat yang strategis sebagai determinan yang sentral dari sifat-sifat ekonomis, politis, sosial, dan kulturil dari suatu masyarakat.

Pendidikan dan pembentukan jiwa inovatif

Perubahan sosial pada hakekatnya adalah dinamisasi unsur-unsur positif yang mengatur kekuatan - kekuatan sosial dan merekonstruksi masyarakat yang ada. Ia mengharuskan adanya sikap terbuka untuk memungkinkan perubahan serta kemampuan untuk menghasilkan dan menerapkan inovasi-inovasi dalam bidang sosial, ekonomi, politik ke arah terwujudnya suatu masyarakat modern.

Ide-ide datang dari orang-orang dan dipraktekkan oleh orang-orang. Jadi, pada hakekatnya inovasi berakar pada pengembangan sumber manusia, tegasnya pada pendidikan. Akan tetapi, pentingnya pendidikan tidaklah terdapat dalam sumbangannya secara langsung kepada pekerjaan-pekerjaan pembangunan, walaupun ini vital, melainkan dalam peningkatan umum kecerdasan bangsa dan dalam melepaskan para warganya dari sikap-sikap sosial dan kulturil yang membuat segala pertumbuhan tak mungkin. Jiwa kritis, objektivitas, kepribadian inovatif, motivasi yang kuat untuk berprestasi; kewiraswastan--itulah kekuatan-kekuatan sosial, kulturil dan psikologis yang menggerakkan perubahan-perubahan sosial dan ekonomi.¹ Untuk mengutip Adam Curle: "It is upon the gradual emergence of the educated, critical, creative mind unfettered by sterile traditions and cleavages that development depends."²

Pendidikan menumbuhkan harapan-harapan, ambisi-ambisi dan aspirasi-aspirasi. Dengan memperkenalkan si-

¹ Meskipun kemajuan-kemajuan sangat besar telah dicapai dalam teori pertumbuhan ekonomi dan dalam teknik-teknik perencanaan ekonomi, oleh para ahli ekonomi diakui bahwa pengetahuan tentang yang sebenarnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi masih sangat tidak sempurna. Maka pendekatan-pendekatan sosial lain telah dilakukan oleh para ahli ekonomi dan ilmu sosial lainnya dengan menggunakan wawasan-wawasan psiko-analise, antropologi, sosiologi, ilmu politik. Baca David E. Novack and Robert Leckahman (eds), Development and Society. The Dynamics of Economic Change (New York: St. Martin's Press, 1964).

² Adam Curle, The Role of Education in Developing Societies (Acera: Ghana University Press, 1961), p. 19.

kap mencari keterangan melalui eksperimen, rasionalitas dan logika, ia menumbuhkan daya pikir kritis, yang tanpa itu transformasi mendalam dalam sikap mental dan pandangan hidup tradisional tak dapat dianggarkan. Sifat-sifat itulah yang harus ditanamkan melalui pendidikan yang mungkin dapat diterapkan kepada setiap masalah, apakah teknik, ekonomi, sosial ataupun politik.

Orang-orang yang disebut "penggerak utama inovasi" mempunyai peranan sangat dominan dalam proses perubahan sosial. Munculnya kelas pertengahan dan perembesan lambat-laun birokrasi pemerintahan dari atas sampai bawah oleh orang-orang yang terdidik baik akan membawa jauh ke arah terciptanya transformasi sosial. Ahli kimia dan fisika tanah, ahli agronomi dan pemuliaan tanaman, ahli ekologi, ahli serangga dan penyakit tanaman, serta ahli ekonomi dan sosiologi pertanian ialah orang-orang yang menemukan cara-cara baru dalam memajukan pertanian dan yang mengajar petani untuk menggunakannya. Mereka termasuk dalam golongan penggerak inovasi, sama halnya dengan dokter, juru rawat, bidan. Seorang insinyur pada hakekatnya ialah seorang "perencana perubahan", dan ahli teknik dan mandor melaksanakan perubahan itu.

Golongan terakhir terdiri dari dosen perguruan tinggi, guru sekolah, dan administrator pendidikan. Mereka merupakan kelompok penggerak utama inovasi yang paling besar jumlahnya. Dalam kata-kata Harbison, mereka adalah "the 'seed-corn' from which new generations of manpower will grow."¹ Disebabkan oleh keca-

¹ F. Harbison, Educational Planning and Human Resource Development (Paris: Unesco., 1967), p. 31.

kipun dalam komunikasi dan dalam pemupukan pribadi-pribadi, secara potensial mereka adalah penggerak perubahan yang sangat berpengaruh.

Jadi, penggerak-penggerak utama inovasi adalah manusia-manusia kreatif dalam pemerintahan, dalam kegiatan-kegiatan swasta, dan dalam pendidikan. Sebagian dari mereka adalah "perancang perubahan" (change designers) yang membuat penemuan-penemuan, menyarankan metode-metode baru dalam organisasi, dan merancang kebijaksanaan-kebijaksanaan baru. Sebagian lagi adalah "pendorong perubahan" (change pushers) yang mampu untuk membujuk, melatih dan mengilhami orang lain untuk mempraktekkan pikiran-pikiran baru. Tapi, apakah perancang atau pendorong perubahan atau dua-duanya, penggerak-penggerak inovasi harus memiliki pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang ekstensif disertai sikap yang sesuai yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.

Indonesia pada waktu ini kekurangan manusia-manusia pembaru dan pendorong perubahan yang mutlak perlu bagi pertumbuhan dan modernisasi. Lagipula sering terjadi pembaruan dan perubahan itu mendapat tentangan. Tentangan itu tidak terbatas pada orang-orang konservatif dan masyarakat-masyarakat primitif. Ia juga menembus yang disebut sektor modern. Birokrasi pemerintahan, perusahaan, dan bahkan sistem pendidikan bisa merupakan penentang-penentang kuat perubahan karena terselubung jiwa konformitas dan tradisi.¹ Maka tugas pen-

¹ "Setiap aparatur pada intinya adalah corps yang konservatif, terikat pada cara-cara dan prosedur-prosedur yang telah terbiasa dan menjadi tradisi baginya, hingga tak mungkin kita harapkan suatu kemampuan penyesuaian diri dari aparatur itu sendiri kepada kondisi baru tanpa melalui suatu "shock therapy." Adnan

didikan nasional kita ialah untuk membuat masyarakat, terutama para pejabat dan pemimpin dalam pemerintahan maupun dalam organisasi swasta, menyadari pentingnya inovasi dan untuk mengembangkan di kalangan mereka sebanyak mungkin inovator-inovator kreatif. Di sinilah pendidikan bisa memberikan sumbangan sebesar-besarnya. Mengingat secara tradisi dikenal dikhotomi "pendidikan umum" dan "pendidikan vokasionil", pertanyaan muncul: manakah di antara kedua jenis pendidikan itu yang potensial bisa menyumbang paling besar kepada pemupukan manusia-manusia yang berjiwa inovatif--"penggerak-penggerak perubahan" dengan mental wiraswasta dan motivasi yang kuat untuk berprestasi?

Pada umumnya orang menerima proposisi bahwa ada hubungan erat antara pendidikan umum dengan kebudayaan,¹ dan bahwa semua kecakapan khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan--sosial, ekonomi, politik--dibangun di atas landasan pendidikan umum. Wharton,² misalnya,

Buyung Nasution, "Dukungan dan Partisipasi yang Luas dari Masyarakat adalah Kunci untuk Suksesnya Repelita," Kompas, Maret 1969.

¹ Misalnya, Earl J. McGrath mendefinisikan "pendidikan umum" sebagai berikut: "General education ... is that which prepares the young for the common life of their time and their kind.... It is the unifying element of a culture. It prepares the student for a full and satisfying life as a member of a family, as a worker, as a citizen--an integrated and purposeful human being;" lihat Sikun Pribadi, "In Search of a Formulation on the General Aim of Education," Ph.D. Dissertation, Ohio State University, 1960, p. 433.

² C.R. Wharton, Jr., "Education and Agricultural Growth: The Role of Education in Early Stage of Agricultural Growth," dalam C.A. Anderson and M.J. Bowman, Education and Economic Development (Chicago: Aldine Publishing Co., 1963), p. 202-29.

dalam menilai peranan pendidikan dasar dan aksarawan bagi pertumbuhan awal pertanian, menyarankan bahwa pendidikan umum mendesak ke belakang batas-batas kultural atau larangan-larangan, memperluas ruang lingkup untuk pembuatan putusan, merangsang motivasi, memungkinkan individu untuk aktif dalam proses rasionalitas yang lebih baik atau memecahkan masalah-masalah yang ia hadapi dan tidak sekedar menerimanya sebagai keadaan yang tak dapat diubah.

Sejumlah studi tentang hubungan antara pendidikan umum dengan perubahan teknologi di beberapa negara industri melaporkan bahwa pendidikan umum dapat memperbesar sangat mobilitas pekerjaan-pekerjaan;¹ bahwa, sedikitnya sejauh yang menyangkut sekolah-sekolah, ada terdapat persetujuan yang luas tentang kebutuhan sangat akan "anak-anak muda dengan fondasi yang baik" dan bukan dengan latihan vokasionil, dan karenanya suatu keuntungan jika maksud-maksud vokasionil tidak harus dicapai terlalu pagi;² dan bahwa industri modern meminta pendidikan dalam prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang umum dan fleksibel, sehingga orang-orang dapat menerapkan keterampilan mereka kepada tuntutan-tuntutan yang berubah terus dan sukar untuk diramalkan.³

¹ H. Leibenstein, "Shortages and Surpluses in Education in Underdeveloped Countries: A Theoretical Foray," dalam Anderson and Bowman, op.cit., p. 51-62.

² E. Ginzberg, "Education and National Efficiency in the U.S.A.," dalam Halsey, op.cit., p. 68-79.

³ H. Schelsky, "Technical Change and Educational Consequence," dalam Halsey, op.cit., p. 31-6.

Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Bahwa pendidikan sekolah dan bentuk-bentuk pendidikan lain mempunyai arti penting bagi pertumbuhan telah lama diakui, walaupun para ahli ekonomi mula-mula kurang memberikan perhatian padanya.

Untuk sebagian ini adalah refleksi dari suatu kepercayaan baru, pengharapan yang penuh keinginan bahwa pendidikan formil dapat membuka pintu untuk melepaskan arus pertumbuhan. Akan tetapi juga telah dilakukan banyak pemikiran keras tentang masalah ini. Para pemimpin negara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan mereka meminta petunjuk-petunjuk yang lebih eksplisit. Para ahli perancang pembangunan menemukan masalah-masalah yang lebih kompleks dan lebih banyak dari yang diduga semula. Banyak di antara mereka yang semakin sadar akan batas alat-alat analisa mereka walaupun alat-alat baru telah ditemukan.

Masalahnya ialah bahwa, walaupun telah diakui bahwa orang-orang memperoleh pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang berguna, namun bagi kebanyakan orang tidak jelas bahwa pengetahuan dan kecakapan itu merupakan suatu bentuk modal, bahwa modal ini untuk sebagian besar adalah produk dari investasi yang disengaja, bahwa ia di masyarakat barat telah tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada modal konvensional (non-manusiawi), dan bahwa pertumbuhannya itu mungkin sifat yang paling distinktif dari sistem ekonomi masyarakat itu.

Pentingnya "investasi dalam manusia" bagi pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Schultz sebagai berikut.

People are, also, an important part of the wealth of nations. Moreover, as people invest in themselves they can augment the amount of human wealth: in many countries this form of wealth, measured by what it renders to production, is now vastly larger than all other forms taken together. But our knowledge about national wealth is almost wholly restricted to the non-human components, that is, to reproducible physical capital and land. The

study of human wealth is everywhere neglected notwithstanding its importance and notwithstanding the fact that people all about us are investing in themselves.¹

Penggunaan kata "investasi" mengandung arti bahwa ada suatu keuntungan bagi masyarakat--sama dengan keuntungan yang diperoleh dari investasi fisik--dan bahwa pendidikan mempunyai di antara fungsi-fungsinya yang pokok peranan menciptakan tenaga kerja yang produktif. Maka sejumlah pertanyaan muncul. Pertama, berapa banyak pendidikan diperlukan pada tahap-tahap yang berbeda dari pertumbuhan ekonomi? Kedua, di manakah hendaknya pendidikan dirangsang secara paling bermanfaat--di universitas, di sekolah menengah, atau di sekolah dasar? Ketiga, jenis pendidikan apa di pandang paling cocok untuk pertumbuhan ekonomi--pendidikan umum atau pendidikan teknik dan vokasionil; pendidikan yang disediakan oleh sistem pendidikan formil bagi anak-anak dan para remaja atau pendidikan di luar sekolah bagi orang dewasa?

Jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa diperoleh dari pengalaman sejarah atau dari analisa ekonomi daripada pendidikan.

Pengalaman sejarah.

Data yang diperoleh dari sejumlah penyelidikan tentang sejarah pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri memberi dukungan kuat pada pandangan tentang adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendidikan. Vaizey dan Debeauvais,² misal-

¹ Theodore W. Schultz, "Investment in Man: An Economist's View" dalam Readings, op.cit., p. 69.

² John Vaizey and Michael Debeauvais, "Economic Aspects of Educational Development" dalam Halsey, op.cit., Ch. 5, p. 40.

nya, menunjuk pada kenyataan bahwa Inggris, negara pertama yang memasuki abad industrialisasi, pada abad ke-19 sudah memiliki penyebaran pendidikan formil yang cukup luas, walaupun taraf pendidikan rata-ratanya relatif lebih rendah daripada di beberapa negara tetangganya di Eropa.

Easterlin,¹ melalui data yang dikumpulkannya tentang populasi sekolah di sejumlah negara di Eropa, Amerika Utara, dan Oceania antara tahun 1830-1954, secara meyakinkan memberikan bukti-bukti tentang peranan penting dari pendidikan formil dalam penyebaran teknologi modern. Data-datanya menunjukkan bahwa pada abad ke-19 negara-negara di mana teknologi modern menyebar paling cepat--Amerika Serikat, Jerman, Switzerland, Negara-negara Rendah, Negara-negara Skandinavia dan Perancis--hampir tanpa kecuali mempunyai proporsi populasi (enrollment ratio) sekolah yang relatif tinggi sejak tahun 1830. Beberapa dari negara-negara ini bahkan telah mempunyainya sebelum tahun itu. Data-data itu menunjukkan selanjutnya bahwa negara-negara yang mula-mula berhasil mengambil teknologi Inggris pada abad 19, semuanya mempunyai taraf pendidikan formil yang lebih tinggi daripada Inggris ketika itu; dan di semua negara yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mantap itu, pendidikan formil atau telah mencapai taraf yang tinggi atau dalam waktu singkat telah ditingkatkan pada taraf tinggi. Juga sebuah dokumen Unesco² memberikan keterangan serupa, yakni bah-

¹ Richard A. Easterlin, "A Note on the Evidence of History" dalam Anderson and Bowman, op.cit., Ch. 2, p. 422-29.

² "The Economic Impact of Primary Education," Unesco document dalam Readings, op.cit., p. 148-51.

wa Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan negara - negara Skandinavia memasuki industrialisasi dengan penduduk yang menikmati pendidikan dasar yang hampir universal.

Hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendidikan telah diungkapkan pula oleh sejumlah studi kasus. Sebuah contoh yang meyakinkan berasal dari V.E.Komarov¹ (Institute of World Economy, Moscow) tentang pengalaman Uni Soviet. Sebelum Revolusi Oktober (1917) Rusia adalah suatu negara terbelakang--ekonomi maupun kulturil. Lebih dari tiga-perempat rakyatnya buta huruf. Di bawah rejim baru pembangunan ekonomi dilaksanakan secara bergandengan dengan pembangunan pendidikan. Salah satu tindakan pertama pemerintah dalam bidang pendidikan ialah melakukan kampanye pemberantasan buta huruf dan membawa anak-anak, para remaja dan orang dewasa ke dalam sekolah. Bisa baca-tulis saja tidak cukup; pengetahuan teknologi yang dipandang sangat perlu bagi pembangunan industri dan pertanian sangat ditekankan.²

Dalam waktu 29 tahun antara 1933-1962 biaya pendidikan naik lebih dari dua puluh lima kali dari 493 juta rubel pada 1933 menjadi 12.400 juta rubel pada 1962, atau sebagai persentase dari seluruh anggaran negara dari 11,7 persen pada 1933 naik menjadi 15,4 persen pada 1962.³ Menurut angka-angka sensus 1959 buta huruf di antara penduduk dewasa praktis telah lenyap, semua anak-anak usia di bawah 15 tahun menerima pen-

¹ V.E.Komarov, "The Relationship between Economic Development and the Development of Education" dalam Readings, op.cit., p. 85-92.

² Komarov, op.cit., p. 87.

³ Ibid., p. 88.

didikan formil, dan separuh dari semua penduduk usia 15 tahun lebih menerima pendidikan sesudah sekolah rendah. Dari jumlah ini 82,5 persen telah menerima pendidikan menengah, dan 17,5 persen telah mengikuti kursus tujuh tahun yang tak lengkap.¹

Seluruh standar pendidikan para pekerja telah berubah secara radikal. Jika sebelum Revolusi kebanyakan pekerja dan petani buta huruf, sekarang praktis sepertiga dari mereka memperoleh pendidikan menengah atau pendidikan yang lebih tinggi lagi; 88 dari setiap 100 pekerja intelektual telah memperoleh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Sebaliknya, peningkatan standar pendidikan, kulturil dan teknis para pekerja menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, dan dalam peningkatan produktivitas pekerja serta pendapatan negara. Dalam Rencana Tujuh Tahun yang sekarang, misalnya, 75 persen dari seluruh kenaikan dalam angka-angka output industri USSR diperkirakan berasal dari peningkatan produktivitas pekerja. Kira-kira sepertiga dari kenaikan ini disebabkan oleh perbaikan mutu pendidikan dan peningkatan syarat-syarat bagi para pekerja. Menurut kalkulasi Strumulin, 23 persen dari pendapatan nasional negara pada tahun 1968 berasal dari perbaikan syarat-syarat dan taraf teknis dan kulturil dari para pekerja; dan setiap rubel yang ditanam dalam pendidikan menghasilkan pertambahan lebih dari tiga rubel dalam pendapatan nasional.²

¹ Ibid., p. 89.

² Ibid., p. 90. Lihat pula Stanislav Strumulin, "The Economics of Education in the U.S.S.R." dalam *Economic and Social Aspects of Educational Planning* (Paris: Unesco, 1964), Chapter III.

Peristiwa historis yang spektakuler telah pula diperlihatkan oleh pengalaman Jepang. Jepang adalah negara yang langka dalam sumber-sumber alam tapi mencapai laju pertumbuhan lebih awal dan lebih cepat dari negara-negara tetangganya yang lebih kaya dalam sumber-sumber fisik. Para ahli sejarah ekonomi menyarankan bahwa take-off Jepang terjadi dalam era Meiji (1868-1912).¹ Dalam periode setengah abad itu Jepang muncul keluar dari masa lampau pra-industri, agraris, dan feodalnya dan mulai mengubah dirinya menjadi negara industri modern. Sangat menarik perhatian bahwa hanya dalam 30 tahun setelah diperkenalkannya sistem sekolah modern, proporsi populasi pendidikan rendah mencapai hampir 100 persen dan bahwa modernisasi umum Jepang dicapai pada periode yang sama. Proporsi populasi pendidikan rendah meningkat dari 28 persen pada tahun 1873 menjadi 50 persen pada tahun 1885 dan melampaui 95 persen sejak tahun 1905. Antara jumlah murid yang terdaftar di pendidikan menengah, produksi dan pendapatan per kapita selama periode 1895-1925 terdapat korelasi yang tinggi. Yang juga menarik ialah terjadinya pergeseran dalam proporsi murid pendidikan menengah, yang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Persentase murid dalam program-program pendidikan umum menurun dari 84,7 persen pada 1895 menjadi 68,7 persen pada 1915, dan menjadi 58,3 persen pada 1960 untuk keuntungan program-program teknik, perdagangan dan

¹ W.W. Rostow, menetapkan take-off Jepang terjadi dalam periode 1878-1900; dalam The Stages of Economic Growth (Cambridge: Cambridge University Press, 1960), p. 38.

kejuruan lainnya.¹

Generalisasi sementara tentang pengalaman-pengalaman sejarah itu menyarankan bahwa pendidikan tampaknya memang memegang peranan yang menentukan dalam pertumbuhan ekonomi. Atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa ada terdapat korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan angka-angka pengeluaran dalam pendidikan, akan tetapi ini tidak harus suatu bukti tentang hubungan sebab-akibat. Namun demikian proposisi kebalikannya bisa dibuat: tidak mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi tanpa suatu sistem pendidikan yang mendukungnya.

Menilai sumbangan ekonomi dari pendidikan

Dalam bagian tentang hubungan pendidikan dengan perubahan sosial telah kami sampaikan lukisan kasar tentang proses dalam mana pendidikan dan ekonomi menjadi semakin dekat sampai saat sistem pendidikan menempati tempat strategis sebagai determinan pokok sifat-sifat ekonomi, politik, sosial dan kulturil dari masyarakat. Walaupun begitu, sumbangan konkrit dari pendidikan kepada pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertanyaan terbuka.

¹ Untuk diskusi tentang pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Jepang, lihat Oteng Sutisna, "The Role of Education in Modernization in Japan and in Indonesia-A Comparative Study," sebuah paper Anthropology 216 Comparative Seminar on East Asia, Winter 1966-67, Stanford University. Lihat pula: Herbert Passin, Society and Education in Japan (New York: Columbia University, 1965); Japan's Growth and Education (Tokyo: Ministry of Education, 1963); dan History of Industrial Education in Japan (Tokyo: Japanese National Commission, 1959).

Selama beberapa tahun terakhir para ahli ekonomi telah memberikan perhatian besar terhadap pertanyaan ini dari sudut pandangan pembangunan ekonomi. Dalam hubungan ini sedikitnya dapat dibedakan tiga pendekatan pokok.¹ Yang pertama, yang disebut "pendekatan residual," menghitung sumbangan-sumbangan dari modal, input tenaga kerja, dan sumber-sumber fisik kepada pertumbuhan produksi, dan apapun yang tertinggal sebagai sisa (residu) dianggap berasal dari "faktor manusia" yang berisi pengetahuan teknis dan komersial dari para manager, pegawai dan pekerja, kualitasnya sebagai pemimpin, kemauan dan kesanggupannya untuk bekerja, dan kondisi sosial. Sejumlah studi yang menggunakan pendekatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan dalam produksi di negara-negara industri selama separuh abad terakhir tidak dapat diterangkan oleh input modal fisik, output per orang per jam, atau sumber-sumber alam. Bagian yang pokok itu harus dianggap disebabkan oleh "faktor manusia" di mana pendidikan memainkan peranan sangat penting.

Solow,² misalnya, memperkirakan bahwa hanya 10 persen dari pertumbuhan ekonomi bisa diterangkan berasal dari pertumbuhan penduduk dan sumber-sumber fisik, sedang sisa yang 90 persen dianggap disebabkan oleh faktor "residual." Aukhurst,³ yang membuat studi tentang produksi nasional di Norwegia (1900-1955), menarik kesimpulan bahwa kemungkinan-kemungkinan untuk

¹ Bandingkan W.G. Bowen, "Assessing the Economic Contribution of Education" dalam Blaug, op.cit., p. 67-100.

² R. Solow, "Investment and Economic Growth: Some Comments" dalam Readings, op.cit., p. 209-13.

³ Odd Aukhurst, "Investment and Economic Growth" dalam Readings, op.cit., p. 190-200.

mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan investasi adalah jauh lebih kecil dari yang biasa diduga semula, oleh karena laju pertumbuhan tidak dipengaruhi kuat oleh tingkat investasi dan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan banyak jika usaha-usaha baru dibuat dalam bidang pendidikan dan penyelidikan ilmiah.

Denison,¹ dalam studinya untuk mengukur pengaruh dari sejumlah faktor yang cukup besar (ia mengidentifikasi 28 jenis sumber pertumbuhan) yang dapat menerangkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama periode 1929-57, menemukan bahwa 25 persen dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama periode itu berasal dari pendidikan melalui peningkatan pengajaran penduduk yang bekerja. Tetapi perluasan penelitiannya terhadap pertumbuhan ekonomi di delapan negara Eropa selama periode 1955-62 menunjukkan bahwa bagian pertumbuhan yang dianggap berasal dari pendidikan adalah jauh lebih kecil dari yang dicapai di Amerika Serikat. Di 6 negara Eropa yang diselidikinya (Denmark, Norwegia, Perancis, Jerman, Holland, Itali) pendidikan "menerangkan" kurang dari 10 persen dari pertumbuhan, sedangkan di 2 negara lainnya (Belgia 17%, dan Inggris 14%) peranan pendidikan mendekati yang terdapat di Amerika Serikat.²

Pendekatan kedua ialah "pendekatan korelasi" yang menggunakan perbandingan antar negara. Pada dasarnya pendekatan ini menghubungkan sejumlah penunjuk kegiatan pendidikan dengan sejumlah penunjuk kegiatan ekonomi.

¹ E.E. Denison, "Measuring the Contribution of Education (and the Residual) to Economic Growth" dalam Readings, op.cit., Tabel 1.

² E.E. Denison, "Why Growth Rates Differ" (Washington D.C.: Brookings Institution, 1967) Tabel 15-3 dan 21-1.

Harbison dan Myers,¹ misalnya, menyelidiki hubungan antara proporsi populasi pendidikan formil dan pendapatan nasional per kapita di 75 negara. Hasil-hasilnya menunjukkan korelasi yang tinggi pada semua tingkat pendidikan antara populasi pendidikan (dan karenanya investasi dalam pendidikan) dan pendapatan bruto nasional (GNP) per kapita. Pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi korelasi itu lebih tinggi daripada di tingkat pendidikan rendah.

Bowman dan Anderson,² yang juga membuat perbandingan-perbandingan antara pendapatan nasional dan tingkat-tingkat pendidikan, menyarankan bahwa meskipun ada korelasi positif antara tingkat-tingkat atau penyebaran pendidikan dan tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi, hubungan-hubungan itu tidak pasti, fleksibel. Bagi mereka penunjuk-penunjuk penyebaran pendidikan rendah adalah peramal ekonomi yang lebih baik daripada luas pendidikan sesudah pendidikan rendah.

Pendekatan ketiga--"pendekatan perolehan pendidikan" (rate-of-return approach)--menganggap bahwa penghasilan orang berpendidikan berasal dari "investasi" dalam pendidikan, dan karenanya menilai penghasilan sebagai produk pendidikan. Konsekwensi-konsekwensi ekonomis dari pendidikan dipelajari dengan mempertentangkan penghasilan orang-orang yang berpendidikan "kurang." Maka perbedaan-perbedaan dalam penghasilan itu, sesudah diukur melalui analisa cost-benefit, dinya-

¹ Harbison and Myers, op.cit.

² Mary J. Bowman and C. Arnold Anderson, "Concerning the Role of Education in Development" dalam Readings, op.cit., p. 113-31.

takan sebagai persentase keuntungan investasi dalam pendidikan untuk perorangan maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.¹

Pendekatan seperti ini, karena kesederhanaannya dan bahkan kadang-kadang bersifat sembarangan, kurang dapat dipercaya. Pertama, karena ia mengandalkan penggunaan pekerja secara penuh dan bahwa korelasi antara penghasilan dan pendidikan itu menunjukkan hubungan sebab akibat--padahal ini mungkin hanya menyatakan hubungan antara kedudukan sosial, pendidikan, dan status ekonomi. Kedua, pengukuran pembiayaan pendidikan yang sesungguhnya sangat sulit sekali. Pengukuran itu, terang, harus meliputi pengeluaran oleh murid, keluarga, masyarakat, dan negara. Kecaman terhadap pendekatan ini juga menekankan bahwa pertimbangan-pertimbangan serupa itu mengabaikan apa yang disebut sumbangan-sumbangan "konsumsi" atau "kultural" dari pendidikan. Soalnya ialah, bahwa pendidikan dianggap mempunyai maksud-maksud lain selain meningkatkan daya produksi ekonomi potensiil seseorang. Meskipun begitu, hanya daya produksi itulah yang dipertimbangkan dalam pengukuran keuntungan-keuntungan pendidikan itu.² Bagaimanapun, pengukuran dengan analisa cost-benefit itu hampir tanpa kecuali menunjukkan bahwa dari sudut produktivitas, keuntungan (rate of return) dari pengeluaran-pengeluaran pendidikan sama tingginya--dan bahkan kadang-kadang lebih tinggi--dengan keuntungan-keuntungan dari investasi di bidang lain.

¹ Baca Blaug, op.cit., Part Three, "Cost-Benefit Analysis of Educational Expenditures," p. 137-259.

² J.Vaizey, "The Returns to Education" dalam Readings, op.cit., p. 592-600.

Implikasi dari semua ini bagi perencanaan pendidikan dalam rangka pembangunan ekonomi ialah bahwa kemampuan usaha pendidikan dalam hubungan dengan peningkatan produktivitas pekerja sangat bergantung pada lingkungan sosial dan kelayakan pendidikan itu sendiri maupun pada keseimbangan yang cocok antara investasi dalam pendidikan dengan investasi ekonomi. Hanya jika pendidikan menjadi bagian dari rencana pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi baik, meliputi sektor-sektor pemerintah dan swasta daripada ekonomi dua-duanya, ia akan dapat menjalankan fungsinya dengan penuh. Singkatnya, relevansi setiap kebijaksanaan pendidikan bergantung pada lingkungan sosial, kultural, politik, dan ekonomi di mana ia dipergunakan.

Pendidikan dan pembangunan politik

Semua pendiri negara baru menghadapi masalah pembangunan pemerintah dan birokrasinya yang efektif serta pengisiannya dengan personil pribumi yang cakap. Mereka semua memikul sedikit-banyak kewajiban untuk mengorganisasi dan memelihara aparat politik yang modern, yaitu administrasi yang dijalankan secara rasional, suatu kader pemimpin-pemimpin yang dikelompokkan dalam sistem partai politik, dan suatu mekanisme tata-tertib umum. Dan mereka berpaling kepada sistem pendidikan sebagai lembaga yang akan mempersiapkan orang-orang untuk peranan-peranan birokrasi dan politik.

Seperti telah dikemukakan, perhatian baru terhadap peranan pendidikan di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang telah menimbulkan gema akademis terutama pada disiplin-disiplin ekonomi dan sosiologi. Namun, pada ilmu politik situasinya agak berbeda.

Kenyataannya ialah bahwa , dengan beberapa pengecualian, para sarjana ilmu politik pada umumnya kurang menaruh perhatian akan sifat umum pertalian pendidikan - politik. Penyelidikan empiris yang telah dilakukan, yang memusatkan secara eksplisit pada cara-cara khusus sistem pendidikan mempengaruhi jalannya sistem-sistem politik atau sebaliknya cara-cara sistem politik mempengaruhi sistem pendidikan, masih relatif belum banyak. Satu sebab kurangnya perhatian dalam apa yang boleh kita sebut "politik pendidikan" ialah bahwa banyak masalah yang relevan dengan studi serupa itu telah dibicarakan, langsung atau tak langsung, di dalam kedua disiplin yang lainnya itu.

Proses pembangunan ekonomi, jelas, mempunyai dimensi politik, karena semua negara memikul tanggungjawab dalam mengatur atau mengarahkan sektor-sektor ekonomi yang penting untuk menciptakan kondisi pertumbuhan yang menyangga diri sendiri (self - sustained growth) atau untuk memeliharanya. Orang dapat mengatakan bahwa, kecuali jika pendidikan menghasilkan tenaga-tenaga manusia untuk meningkatkan produktivitas nasional, ketakhadiran pertumbuhan akan menimbulkan kondisi-kondisi tak menguntungkan bagi stabilitas politik. Sebaliknya, pendidikan dari jenis yang baik dan dalam proporsi yang seimbang menunjang pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya membawa kepada stabilitas politik dan bahkan mungkin kepada demokrasi. Beberapa isu dalam sosiologi pendidikan jelas relevant bagi pertumbuhan politik. Sekolah, sebagai alat sosialisasi yang penting, memindahkan nilai-nilai dan

sikap-sikap mengenai pemerintah kepada anak-anak dan golongan muda. Dalam hal pendidikan memperkuat batas-batas golongan (daerah, etnik, agama) dan menghalangi mobilitas sosial, hasilnya mungkin bahwa partai-partai politik sekedar mewakili golongan-golongan yang berbeda atau mungkin suatu oliarkhi bercokol di atas kursi penguasa.

Singkatnya, dalam ekonomi maupun sosiologi pendidikan ada terdapat perhatian sampingan terhadap perkara-perkara politik. Tapi situasi ini sudah tentu bukan pengganti yang memuaskan bagi usaha menghubungkan pendidikan dengan politik secara langsung dan sistematis. Manfaat suatu studi tentang interaksi pendidikan dan politik ialah bahwa ia memusatkan perhatian pada perkara-perkara penting yang hingga sekarang diabaikan atau dibicarakan hanya secara insidental oleh disiplin lain.

Untuk memulai eksplorasi tentang peranan pendidikan dalam pembangunan politik kita perlu memahami dulu arti "pembangunan politik." Dengan "pembangunan politik" dimaksud pencapaian oleh suatu sistem politik suatu kemampuan politik yang kualitatif baru dan lebih besar, seperti tampak dalam pelembagaan yang berhasil dari (1) pola-pola integrasi baru yang mengatur dan mengendalikan ketegangan-ketegangan dan pertentangan-pertentangan yang diakibatkan oleh diferensiasi yang meningkat, dan (2) pola-pola baru partisipasi dan pemerataan sumber-sumber, yang cukup responsif terhadap tuntutan-tuntutan yang ditimbulkan oleh hakekat persamaan seperti diperintahkan oleh etika yang

meresapi cita-cita operatif dari segala aspek hidup modern.¹

Sepintas lalu, pendidikan kelihatannya determinan utama pembangunan politik seperti dirumuskan di atas. Hanyalah sistem pendidikan modern yang formil dan dilembagakan bisa memberikan kecakapan-kecakapan khusus dan latihan yang diminta buat adaptasi sosial yang efektif kepada proses diferensiasi struktural yang terus-menerus di semua sektor masyarakat modern, dan kepada peningkatan dalam spesialisasi yang menyertainya. Lagi pula, kesanggupan politik, jelas bergantung pada pendidikan modern. Suatu taraf pendidikan massa yang formil harus ada untuk perkembangan sistem komunikasi modern yang sangat penting sekali dalam memecahkan masalah-masalah politik, yakni mengubah sikap-sikap dan mengurangi jurang kultural antara minoritas penguasa tingkat atas (the ruling elite) yang modern (yang berpendidikan) dan mayoritas penduduk yang masih tradisional (yang tak berpendidikan atau berpendidikan terbatas). Untuk memungkinkan komunikasi modern itu tidak saja kepandaian baca-tulis harus dikembangkan, tapi begitu juga unsur-unsur rasional dalam sikap-sikap yang esensial bagi partisipasi dalam proses modernisasi. Kesanggupan baca-tulis maupun sikap-sikap yang selaras dengan modernisasi adalah vital bagi "penembusan" politik yang efektif oleh pemerintah maupun bagi kewargaan negara yang berarti.

Pendidikan formil mempunyai peranan utama dalam menghasilkan kader-kader birokrasi, managerial, teknis,

¹ James S. Coleman (ed), Education and Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1965), p. 15.

dan profesional yang diperlukan untuk modernisasi. Akhirnya, tak diragukan, pendidikan adalah determinan utama dalam realisasi prinsip persamaan dalam masyarakat yang sedang mengejar modernisasi yang dikuasai oleh prestasi dan norma-norma universal. Singkatnya, serangkaian bukti-bukti sepintas lalu yang mengesankan mengacu kepada peranan pendidikan yang sangat penting dalam adaptasi sosial kepada spesialisasi fungsi dan diferensiasi struktural yang meningkat, dalam prestasi kemampuan politik, dan dalam pencapaian persamaan yang maju.

Pengaruh pendidikan terhadap perubahan-perubahan pokok dalam evolusi politik suatu masyarakat sedikit banyak sudah jelas. Namun, secara keseluruhan dampak pendidikan terhadap kehidupan politik di suatu masyarakat jauh kurang jelas. Dalam hubungan ini Coleman¹ menyarankan bahwa pendidikan formal dapat menyumbang kepada proses atau fungsi-fungsi sistem politik sedikitnya di tiga bidang. Ini adalah sosialisasi politik, pengerahan politik (political recruitment), dan integrasi politik.

Pendidikan sebagai alat sosialisasi politik

Gagasan sosialisasi politik mengacu pada proses dalam mana orang-orang memperoleh disposisi tingkah laku yang cocok dengan kelompok-kelompok politik, sistem politik, dan proses-proses politik.² Atau dalam

¹ Ibid., p. 18.

² Robert Levine, "Political Socialization and Culture Change" dalam Clifford Geertz (ed), Old Societies and New States (New York: The Free Press of Glencoe, 1963), p. 281.

kata-kata Almond, "sosialisasi politik ialah proses induksi ke dalam kebudayaan politik."¹ Semua sosialisasi politik melibat unsur-unsur afektif--loyalitas, cinta, rasa hormat, dan rasa bangga terhadap sistem politik.²

Kesanggupan menyesuaikan diri dengan mudah dan kemajuan suatu masyarakat untuk sebagian bergantung pada tersedianya jaringan komunikasi yang efektif antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan lembaga-lembaga. Luas kontak antara pemerintah dengan tingkatan-tingkatan menurun dari sistem sosial serta luas macam arus informasi dan umpan balik (feed-back) tanggapan-tanggapan dari orang-orang dan organisasi-organisasi adalah salah satu ukuran persesuaian antara kenyataan-kenyataan sosial dan proses pengendalian politik. Salah satu kemungkinan penggunaan komunikasi oleh suatu elite politik ialah dalam memindahkan dan memelihara ide-ide, pengetahuan, dan praktek-praktek yang mempengaruhi dan melatih kaum muda untuk induksi ke dalam sektor politik dari sistem nasional.

Impak sosialisasi politik pada kaum muda bisa afektif maupun memajukan. Ia afektif jika tujuannya adalah untuk membentuk sikap-sikap, dan perasaan-perasaan kaum

¹ Gabriel A. Almond and James S. Coleman (eds), The Politics of the Developing Areas (Princeton: Princeton University Press, 1960), p. 27.

² Istilah "sistem politik" oleh para ahli ilmu politik diberi arti yang agak khusus, yakni sistem interaksi yang terdapat di semua masyarakat merdeka yang melakukan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi melalui penggunaan sedikit banyak paksaan fisik yang absah; Ibid., p. 7.

muda terhadap pemerintah di negaranya dan terhadap negara-negara lain; misalnya, loyalitas terhadap tingkatan-tingkatan tertentu sistem politik (desa, kota, daerah, negara); ketaatan pada ideologi negara, prinsip-prinsip, nilai-nilai, atau simbol-simbol (Panca Sila, musyawarah, gotong royong, konstitusi, bendera); dan rasa simpati terhadap berbagai organisasi dan pribadi-pribadi di panggung politik. Ia memajukan, jika perhatiannya tertuju pada aspek-aspek politik yang konkrit: pengetahuan, fakta-fakta, dan praktek-praktek mengenai kegiatan pemerintah; proses pemilihan umum, sejarah politik, hubungan-hubungan luar negeri.

Pendidikan formil adalah salah satu lembaga yang terlibat dalam proses induksi ini. Studi perbandingan yang dibuat oleh Almond dan Verba memperlihatkan bahwa pendidikan formil merupakan faktor yang menentukan dalam proses sosialisasi politik itu. Kesimpulan yang mereka peroleh ialah sebagai berikut:

Educational attainment appears to have the most important demographic effect on political attitudes. Among the demographic variables usually investigated--sex, place of residence, occupation, income, age, and so on--none compares with the educational variable in the extent to which it seems to determine political attitudes. The uneducated man or the man with limited education is a different political actor from the man who has achieved a higher level of education.¹

Niscaya, pendidikan menambah kesadaran seseorang tentang proses politik dan kesanggupannya untuk berpartisipasi di dalamnya. Studi perbandingan itu menun-

¹ G.A. Almond and S. Verba, The Civic Culture (Princeton: Princeton University Press, 1963), p. 379. Negara-negara yang diselidiki ialah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Itali, dan Mexico.

juukkan kesamaan yang menyolok dalam kesimpulannya yaitu bahwa orang-orang dengan pendidikan lebih menyadari kegiatan-kegiatan pemerintah dan mempunyai pendapat yang luas tentang perkara-perkara politik, asyik melakukan perbincangan-perbincangan politik, memandang dirinya mampu untuk mempengaruhi pemerintah, dan memasuki organisasi-organisasi sukarela, lebih daripada mereka dengan pendidikan kurang atau tanpa pendidikan. Orientasi ini merupakan apa yang bisa dipandang "persyaratan minimum" untuk partisipasi politik. Justru orientasi yang dasar inilah condong untuk tidak dimiliki oleh orang-orang dengan pendidikan terbatas.¹

Di negara-negara berkembang, di mana lazim terdapat sikap apatis terhadap politik nasional, penerimaan kekuasaan secara pasif, atau perhatian yang terlalu kuat terhadap perkara-perkara yang melibatkan golongan-golongan daerah, etnik, dan agama tertentu, peranan pendidikan formil sangat penting dalam mempersiapkan orang-orang untuk partisipasi politik. Harapan akan tumbuhnya demokrasi di negara-negara ini mungkin untuk sebagian besar bergantung pada kemampuan sistem pendidikan untuk menyebarkan "persyaratan minimum" tersebut di atas secara merata.

Ini tidak berarti bahwa perluasan sistem pendidikan per se baik bagi demokrasi. Perluasan pendidikan mungkin suatu kondisi yang perlu bagi demokrasi, atau bagi stabilitas politik, akan tetapi belum kondisi yang mencukupi untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Ada masih sejumlah isu yang perlu diperhatikan, seperti: (1) arah orientasi politik yang dikomunikasikan

¹ Ibid., p. 382.

oleh pendidikan formil; (2) implikasi-implikasi dari keselarasan antara kalangan sistem pendidikan dan lembaga-lembaga sosialisasi lainnya dalam mempengaruhi orang-orang; (3) konsekwensi-konsekwensi sosialisasi politik secara menyolok (yaitu dimasukkannya bahan politik secara eksplisit ke dalam kurikulum sekolah); dan (4) makna lingkungan sekolah dalam proses sosialisasi politik (konteks khusus dan kekuatan-kekuatan yang menunjang atau menolak pengaruh-pengaruh dalam lingkungan yang lebih besar di luar sekolah).¹

Peranan sekolah selaku alat sosialisasi politik masih baru, dan di banyak negara baru merdeka keluarga merupakan lembaga sosialisasi yang paling berarti.² Ini benar, khususnya di Indonesia di mana sebagian terbesar penduduk bermukim di desa-desa dan daerah pedalaman. Tujuan-tujuan yang paling fundamental dari proses sosialisasi dicapai dalam hubungan keluarga. Walaupun begitu, sekarang semakin banyak unsur-unsur pokok proses ini berjalan di sekolah-sekolah. Ini meliputi pendidikan kewargaan negara, pelajaran sejarah, menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional, melakukan upacara-upacara bendera dan kegiatan-kegiatan memperingati peristiwa-peristiwa nasional penting,

¹ Untuk diskusi tentang isyu-isyu ini lihat Coleman, *op.cit.*, p. 19-25.

² Kedudukan utama dari keluarga di negara-negara berkembang dalam mensosialisasikan penduduk yang bermukim di daerah-daerah pedesaan dikemukakan dengan tegas dalam sejumlah karangan dalam buku Coleman. Juga Levine menjelaskan bahwa "orang tua di daerah pedesaan mensosialisasikan anak-anaknya untuk partisipasi dalam sistem kekuasaan lokal dan tidak untuk peranan-peranan dalam kewargaan nasional." Mobilisasi sosial yang terbatas, penembusan yang lemah oleh pemerintah nasional, diskontinuitas dalam sistem komunikasi, dan ketakha-

dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pengajaran dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia, sama dengan Sang Merah Putih, dipandang searti dengan ide negara Indonesia.

Pendidikan kewargaan negara hendak menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa dan kebudayaannya, serta kesetiaan kepada ideologi negara. Dalam arti yang luas ia berarti pengembangan tanggungjawab kewargaan negara, kesanggupan sosial dan prestasi individu yang setinggi mungkin. Pendidikan kewargaan negara yang baik meliputi pengetahuan tentang warisan bangsa--tradisi dan nilai-nilai sosial serta penyesuaian dan pertumbuhannya; pahlawan-pahlawan nasional yang terkemuka; cita-cita dan aspirasi-aspirasi nasional; pengetahuan fungsional tentang pemerintahan dan hak-hak serta tanggungjawab-tanggungjawab.

Suatu paradoks ialah bahwa di negara-negara baru merdeka sistem pendidikan formil memikul beban sosialisasi politik yang lebih berat daripada di negara-negara yang lebih tua. Hakekat nation building memerintahkan bahwa pemerintah nasional menciptakan lembaga-lembaga nasional untuk menanamkan perasaan berbangsa dan bernegara satu. Sistem pendidikan formil diberi beban ini karena, terang, terhitung lembaga sosialisasi yang paling potensiil dan bisa digunakan secara efektif. Beban sosialisasi sekolah di negara-negara baru merdeka juga berat disebabkan ketakhadiran atau keterbelakangan lembaga-lembaga kebudayaan lain-

diran atau keterbatasan pendidikan massa adalah di antara keterangan-keterangan yang banyak diberikan tentang kemampuan keluarga dalam proses sosialisasi. Maka masalah tentang pentingnya keselarasan antara pola-pola kekuasaan keluarga dan para pemimpin politik nasional di satu pihak dan perluasan pendidikan yang merata di lain pihak menjadi sangat mendesak.

nya. Kesimpulannya jelas: justru di negara yang baru merdeka sistem pendidikan formil harus ditingkatkan kepada peranan yang lebih menentukan dalam proses sosialisasi. Dan daya guna peranan ini bergantung pada luasnya sistem pendidikan dilibatkan dalam fungsi-fungsi yang relevan bagi proses politik nation building dan caranya fungsi-fungsi ini menciptakan kondisi-kondisi bagi pertumbuhan politik.

Pendidikan sebagai pusat pengerahan politik

Pembicaraan tentang peranan pendidikan dalam pengerahan elite politik, tak dapat tidak, melibat masalah stratifikasi sosial dan mobilitas ke atas di dalam masyarakat. Teori stratifikasi menyarankan bahwa peluang seseorang untuk mencapai status elite politik sangat diperbesar bila ia termasuk atau bisa beranjak memasuki tingkat-tingkat atas dari sistem stratifikasi; bahwa dalam masyarakat modern yang berpedoman kepada prestasi, pendidikan condong untuk menjadi determinan utama mobilitas sosial, karena hanya ialah membawa kepada pencapaian jabatan yang lebih tinggi dan karenanya kepada pendapatan yang lebih besar, status sosial tingkat atas, dan posisi-posisi prestise yang lebih baik; dan bahwa pendidikan, karenanya, adalah jembatan yang paling utama ke status elite.¹ Kenyataan bahwa pemerintah dan politik di kebanyakan negara baru merdeka berada di tangan minoritas yang berpendidikan universiter² mendukung asumsi bahwa ada pertalian

¹ Coleman, op.cit., p. 25-26.

² Lihat Clifford Geertz (ed), Old Societies and New States (New York: The Free Press of Glencoe, 1963). Untuk kasus Indonesia, lihat George McT. Kahin (ed). Major Governments of Asia (Ithaca: Cornell University Press, 1958), Part V, "Indonesia," khususnya "The Political Elite," p. 526-28.

erat antara pendidikan, mobilitas ke atas, dan status elite politik.

Pendidikan dianggap alat penting tidak saja dalam pengerahan pemimpin-pemimpin politik tapi juga dalam pengerahan pengikut-pengikut. Usaha-usaha suatu kelompok elite untuk menumbuhkan kesadaran identitas nasional yang baru melalui partai-partai politik untuk sebagian besar bergantung pada aktivis-aktivis partai pada tingkat lokal, yang menjelaskan program-program politik kepada penduduk sambil memelihara organisasi-kecakapan-kecakapan yang meminta sejumlah kemampuan baca-tulis tertentu. Juga tak boleh diabaikan orang-orang yang berdiri di tengah-tengah antara elite dan rakyat umum, yang memindahkan ide-ide baru ke bawah.

Guru, disebabkan oleh posisinya di masyarakat, secara potensi politik menduduki tempat yang sangat berarti, tidak saja mungkin sebagai peserta langsung dalam politik tapi juga sebagai mata rantai komunikasi antara elite modern dan massa rakyat.¹ Sebagai kelompok guru-guru cenderung untuk menempati posisi tengah di antara kedua pihak itu. Pendidikan mereka menaikannya di atas rakyat umum. Namun, mereka itu jumlahnya terlalu banyak, geografis terlalu terserak, dan terlalu berbeda dalam pendidikan dan pengalaman untuk

¹ Di masa lalu guru dan bekas guru memainkan peranan penting di dalam politik negara-negara berkembang; di kebanyakan dewan pembuat undang-undang di negara-negara baru di Afrika, misalnya, mereka pernah merupakan kelompok vokasionil yang paling besar; lihat David Abernethy and Trevor Coombe "Education and Politics in Developing Countries," Harvard Educational Review, Vol. 35, No. 3 Summer 1965, p. 295.

dianggap anggota elite semuanya. Antara minoritas ke-kotaan yang modern, yang memegang kekuasaan politik serta kedudukan-kedudukan dengan kekuasaan dan pengaruh, dan mayoritas petani pedesaan sering terdapat komunikasi yang sangat jarang. Guru bisa berfungsi sebagai penyambung utama komunikasi. Ide-ide tentang nasionalisme bisa dipindahkan dari para pemimpin politik melalui guru kepada massa rakyat. Sering ia--apakah diijinkan atau tidak--seorang aktivis partai yang melakukan penerangan tentang program-program politik, organisasi politik, dan pendidikan politik. Dan mungkin melalui ia beberapa dari kebutuhan rakyat pedesaan menjadi diketahui oleh pemimpin-pemimpin politik.¹

Di pihak lain, status guru di negara sedang berkembang sedang mengalami kemunduran. Perluasan cepat dari pendidikan, yang disebabkan oleh aspirasi-aspirasi baru bangsa yang baru merdeka ditambah dengan eksplosif penduduk, telah memaksa pemerintah untuk menambah cepat personil pengajar; dan karena persyaratan mengajar minimum terpaksa diturunkan untuk memasukkan banyak guru baru, prestise guru cenderung untuk jatuh dalam pandangan masyarakat, dan bahkan dalam pandangan mereka sendiri. Setelah merdeka, karena proyek-proyek pembangunan membuka kesempatan bagi jabatan-jabatan baru yang lebih menguntungkan--dalam kantor-kantor pemerintah, industri, dan perdagangan--tidak sedikit guru-guru yang paling berwenang tertarik padanya dan meninggalkan profesinya. Hal mengalirnya guru-guru ke luar dari sistem pendidikan itu menambah kemunduran status guru di masyarakat.²

¹ Ibid., p. 296.

² Ibid., p. 297.

Pendidikan sebagai alat integrasi politik

Sekolah-sekolah, jelas, berharga bagi para pemimpin politik untuk tujuan-tujuan integrasi politik. Mereka menyadari bahwa populasi sekolah adalah "pendengar" yang memiliki arti politik yang sangat besar, disebabkan jumlahnya yang besar dan mudah dipengaruhi. Memasukkan sebagian besar dari mereka ke dalam sekolah langsung memajukan kesatuan nasional, karena menjamin bahwa sebagian penduduk yang beraneka dibekali sejumlah ketrampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai modern yang sama. Khususnya, lebih besar populasi sekolah lebih banyak orang dibawa ke dalam jangkauan indoktrinasi pemerintah. Kurikulum-kurikulum bisa dirancang, yang menjelaskan apa yang hendaknya dipercayai tentang pemimpin-pemimpin negaranya, sejarah bangsanya, konstitusinya, cita-cita masyarakatnya, kebudayaan nasional, kebutuhan akan pembangunan, dan tanggungjawab kewargaan negara oleh para pelajar.

Hal lain yang juga penting bagi integrasi politik ialah proses akulturasi. Kata akulturasi menunjuk kepada perubahan-perubahan dalam suatu kebudayaan yang ditimbulkan oleh pengaruh kebudayaan lain, yang menghasilkan kesamaan yang bertambah atau perbedaan yang bertambah di antara kebudayaan itu masing-masing. Dalam karangan ini kata akulturasi dihubungkan terutama dengan pertukaran kebudayaan dan persentuhan yang terjadi di antara berbagai kelompok etnik, agama, dan sosial di dalam sistem pendidikan dan dengan proses nasionalisasi atau "homoginisasi" kaum muda dalam suatu negara yang pada tahun-tahun permulaan kemerdekaannya mengalami kekuasaan dan kesetiaan politik yang terpecah-pecah.

Penggunaan bahasa Indonesia sesudah merdeka sebagai bahasa negara dan bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan formil di seluruh Nusantara terbukti sangat berpengaruh dalam proses integrasi politik. Bahasa Indonesia dengan cepat sekali telah berkembang sebagai lingua franca yang efektif di banyak daerah di mana sebelum 1945 tidak dipakai.

Sekarang bahasa Indonesia adalah jembatan akulturasi antara berbagai kelompok etnik, dan dengan begitu mengurangi pertentangan-pertentangan kultural dan masalah-masalah komunikasi politik. Maka sistem pendidikan menjadi lembaga yang paling berpengaruh dalam mempersatukan kebudayaan-kebudayaan lokal tradisional ke dalam satu kebudayaan Indonesia modern yang sedang tumbuh, yang pada gilirannya mewakili kesatuan negara Indonesia.

Peranan yang dijalankan oleh sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam proses akulturasi itu sangat penting sekali. Lebih tinggi tingkat pendidikan formil lebih beraneka populasi sekolah, dan unit-unit yang paling besar pada tiap tingkat pendidikan condong untuk memiliki populasi yang paling bermacam. Lembaga-lembaga pendidikan formil yang menikmati prestise sosial dan akademis paling tinggi sering menarik pelajar-pelajar dari kebanyakan kelompok etnik dan agama dari seluruh Nusantara. Universitas-universitas Indonesia, Gajah Mada, Pajajaran, Airlangga, Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor adalah beberapa contoh pemusatan aneka penduduk Indonesia dalam ukuran kecil.

Di negara-negara berkembang peranan universitas dan lembaga perguruan tinggi lainnya adalah istimewa penting karena tidak saja harus menghasilkan elite yang akan memodernkan masyarakat tapi juga bertanggungjawab tentang pengembangan ilmu dan pembinaan hidup intelektual pada umumnya di negara masing-masing. Juga bagian penting dari elite politik lambat-laun muncul dari kalangan para lulusan perguruan tinggi.

Dalam abad nasionalisme universitas-universitas juga dibebani misi kebudayaan, yaitu untuk menyebarkan kebudayaan universal dan untuk menyumbang kepada pertumbuhannya, dan bersamaan dengan itu memupuk dan mengembangkan kebudayaan nasional yang asli, aktual, atau potensial, dan memajukan kehidupan nasional. Tugas menterjemahkan warisan kebudayaan asli melalui ilmu bahasa dan seni, sosiologi, antropologi, historiografi, sejarah kesusasteraan, dan kritik juga harus dibina menurut standar-standar dan prosedur-prosedur validitas universal. Substansi dan prosedur pelajaran di universitas tidak saja memakai universalitas, tapi sejak permulaan abad modern dan tetap hingga sekarang berasal dari perolehan perguruan tinggi dan perorangan di seluruh dunia.

D . Tugas-Tugas Pendidikan Bagi Bangsa Yang Sedang Membangun

Analisa pendidikan di bawah kondisi-kondisi perubahan sosial-ekonomi-politik di muka itu telah memperkuat proposisi bahwa pendidikan yang cocok di bawah kondisi yang cocok dapat menjalankan tiga macam tugas yang pokok dalam pertumbuhan dan perubahan masyarakat di mana ia beroperasi. Tiga tugas pendidikan itu adalah yang berikut: (1) pendidikan untuk pengembangan pribadi dan perubahan sosial, (2) pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, dan (3) pendidikan untuk pembangunan politik. Perlu kiranya ditekankan di sini, bahwa seperti dengan dimensi-dimensi pembangunan nasional itu sendiri, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, begitu pula dengan tugas-tugas pendidikan ini. Setiap tugas jalin-menjalin dengan yang lainnya, sehingga setiap pikiran untuk memisahkannya dapat dibuat tak mungkin.

Pendidikan untuk pengembangan pribadi dan sosial

Proses untuk mencapai modernitas, yaitu proses pembangunan dalam arti yang paling luas, adalah proses

ubahan yang fundamental dalam mental dan karakter orang dan cara ia menggunakan dunia materi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pendidikan dipandang esensial sebagai pelaku perubahan dan perkembangan dalam manusia dan masyarakat. Ia adalah bagian integral, bagian yang esensial dan tak dapat dihindarkan, dari bagian proses perkembangan itu sendiri. Oleh karena itu, penghalang dalam pertumbuhan di negara sedang berkembang kini tidak semata-mata modal materiil atau sumber fisik; penghalang yang paling kuat adalah orang-orangnya. Tidak ada masyarakat butahuruf pernah mencapai kemajuan yang berarti. Sebaliknya, tidak pernah masyarakat yang terdidik dengan kepemimpinan yang terlatih baik tetap terbelakang. Pendidikan yang menanamkan dan merangsang jiwa kritis, objektivitas, kewirausahaan, kepribadian inovatif, dan motivasi yang kuat untuk berprestasi, tak dapat tidak, akan mendobrak penghalang-penghalang pertumbuhan, menggalakkan mobilitas geografis dan vokasionil, meningkatkan kemampuan berproduksi, menciptakan permintaan-permintaan baru, dan memperbesar inovasi-inovasi. Dari sudut pandangan percepatan proses pembangunan, usaha harus ditekankan pada penyebaran perubahan ke seluruh masyarakat. Program-program pendidikan hendaknya diarahkan kepada penyesuaian-penyesuaian yang diinginkan dalam lingkungan sosio-kultural, sedemikian sehingga pengetahuan baru dan keterampilan baru dapat diperoleh dan dipakai, keharusan akan perubahan diakui, dan motivasi untuk cara hidup baru dirangsang.

Pendidikan harus senantiasa berorientasi kepada masa datang. Pendidikan serupa itu tidak akan mengesampingkan warisan budaya masa lampau. Ia akan menimba kekuatan-kekuatan warisan itu, tapi menuntut bahwa kekuatan-kekuatan warisan itu memenuhi syarat-syarat

masa baru. Pendidikan serupa itu tidak akan mengabaikan partisipasi aktif dalam dunia hari ini, karena hanya dengan partisipasi dalam kehidupan masyarakat itulah kekuatan dapat dipupuk dan kepekaan dipertajam. Akan tetapi fokusnya yang paling tajam akan pada sumbangan-sumbangan dari sudut pemecahan masalah hari ini dan pembangunan hari esok yang lebih baik. Ringkasnya, maksud-maksud nasional dari pendidikan di suatu negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah untuk mempersiapkan orang-orang untuk berpartisipasi dalam dan menyumbang kepada proses pembangunan nasionalnya.

Tugas sistem pendidikan dalam menanamkan pada kaum muda sikap baru terhadap penguasaan lingkungan fisik mereka, jelas, adalah tugas yang lebih berat lagi. Kebudayaan abad XX dibangun atas dasar kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengendalikan lingkungannya melalui penerapan ilmu pengetahuan. Pada hakekatnya ilmu pengetahuan bukan kumpulan sejumlah fakta. Ia adalah pendekatan terhadap alam semesta, suatu cara memandang kekuatan-kekuatan untuk kepentingan pengendalian serta penggunaannya untuk tujuan-tujuan manusia. Ini berarti, bahwa manusia abad XX memandang dunia secara potensiil mudah menerima pengendalian oleh manusia melalui pengetahuan yang dapat diperiksa benar-salahnya. Karena itu, pendidikan yang ditugasi modernisasi harus sangat menekankan pada pendidikan ilmu pengetahuan alam dan ekologi guna memahami dan mengontrol lingkungan alami dan memelihara hubungan timbal-balik antara hidup dan lingkungannya; pada pendidikan kesehatan (termasuk program keluarga berencana) untuk memelihara dan memajukan kualitas hidup manusia; dan kepada ilmu pengetahuan sosial bagi mengatur atau me-

ngendalikan dan memelihara lingkungan buatan manusia yang kita miliki.

Pendidikan untuk hari ini dan hari esok harus pendidikan yang mempersiapkan orang-orang untuk perubahan-perubahan sosial yang sekarang dan yang bakal datang, mempersiapkan mereka tidak saja dalam arti keterampilan, tetapi dalam arti karakter, perspektif, dan kepribadian yang cocok untuk penyesuaian yang baik kepada situasi baru. Pendidikan untuk hari esok, sudah tentu, akan harus menggali kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam warisan masa silam, yang memenuhi persyaratan jaman baru.

Pendidikan yang benar-benar modern tak akan mengesampingkan warisan estetikanya. Ia akan memupuk dan mengembangkannya. Ia akan membangun di atasnya. Satu di antara penunjuk-penunjuk tentang kebaikan pendidikan nasional yang baru itu hendaknya kemampuannya untuk menghasilkan generasi orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang dapat menggunakan waktu senggang mereka secara kreatif dan konstruktif, orang-orang yang merasa bangga akan hasil karya seni mereka, dan yang memiliki kesadaran identitas dengan masa lampau mereka. Bukan orang-orang yang tidak berakar, melainkan yang tahu harga diri, kreatif, yang harus menjadi tujuan nasional itu. Dalam kata akhir, kejayaan suatu bangsa bergantung pada kesanggupan orang-orang yang menjadi warga bangsa itu. Mengingat alasan inilah tujuan nasional dalam pendidikan harus selalu untuk menghasilkan jenis kaum muda yang dapat dibanggakan.

Walaupun benar bahwa pendidikan harus memenuhi tujuan-tujuan nasional, dalam suatu demokrasi negara pada hakekatnya diciptakan untuk melayani individu, tidak sebaliknya. Jadi, adalah kewajiban pemerintah

untuk menaksir program-program pendidikannya dalam kata-kata tidak saja betapa baik mereka itu memenuhi tujuan-tujuan nasional, tapi juga betapa baik mereka melayani individu-individu itu sendiri. Bukan pengembangan ekonomi, politik, dan sosial dari nasion melulu yang dicari itu; juga kualitas dari perbaikan ekonomi, dari sumbangan politik dan dari partisipasi sosial orang perseorangan. Demokrasi menyandarkan perkaranya pada kemampuannya untuk menyelaraskan kebebasan dan kesejahteraan individu dengan kekuatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu bangsa yang maju, merdeka, adil, dan sejahtera. Hanya di dalam kerangka inilah pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan untuk perkembangan kewarganegaraan negara dan politik, dan pendidikan untuk integritas sosial dan pribadi mempunyai arti yang demokratis.

Pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi

Pengakuan terhadap kemajuan yang luar biasa dari ekonomi sebagai hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada produksi di bidang industri dan pertanian telah menunjukkan bahwa para ilmuwan, insinyur, dan ahli teknik yang sangat terlatih baik untuk sebagian besar menentukan tahap ekonomi suatu masyarakat. Orang-orang ini tidak dapat hadir kecuali jika ada suatu sistem pendidikan yang telah dikembangkan dengan baik yang menghasilkan mereka.

Pertumbuhan sistem industri modern atau ekonomi pertanian-industri-perdagangan yang seimbang telah menjadikan tenaga kerja yang tak terlatih dan tak terampil sebenarnya tak dipakai lagi. Pada waktu yang sama ia menjadikan tenaga kerja yang sangat terampil mutlak perlu. Karena itu, tak terbayangkan bahwa ke-

makmuran bangsa dapat dicapai tanpa perbaikan secara revolusioner dalam taraf pendidikan dan latihan orang-orang yang benar-benar cakap.

Jelas, jenis pertumbuhan ekonomi dan industri dengan pandangan kepada kebutuhan Indonesia sekarang dan bakal datang membawa tuntutan-tuntutan sangat berat terhadap sistem pendidikan nasional, jika ia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertanian, industri, dan perdagangan akan tenaga kerja tingkat tinggi. Personil eksekutif, managerial, profesional dan ilmiah dari semua jenis diperlukan jika pertumbuhan industri, pertanian, dan perdagangan akan dimungkinkan. Di belakang setiap eksekutif, setiap insinyur, setiap ahli penelitian atau ahli pembangunan diperlukan sejumlah besar kader-kader pendukung yang menjadi perantara. Kader-kader perantara ini terdiri dari ahli-ahli teknik yang terlatih baik, tukang-tukang yang terampil, dan juru-juru tulis yang cakap. Orang-orang serupa itu diperlukan tidak saja di sektor-sektor industri, teknologi, dan perdagangan, tetapi juga di sektor-sektor lain, terutama di sektor jasa seperti perbankan, transportasi, komunikasi, akuntansi, asuransi, dan sebagainya.

Peranan yang sentral dari pemerintah dalam perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi meminta bahwa semua departemen dan lembaga negara diisi oleh personil yang cakap. Pembangunan pertanian, yang harus menyertai dan mendukung pembangunan industri, mempunyai tuntutannya sendiri. Lembaga-lembaga penelitian yang diisi oleh personil bukan yang bermutu tinggi, dan sistem pendidikan yang tidak diisi oleh tenaga-tenaga terpilih tidak akan mungkin mampu untuk memenuhi penambahan dalam kuantitas atau peningkatan

dalam kualitas yang diperlukan.

Tetapi, untuk perubahan menjadi bangsa yang modern diperlukan lebih dari pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah seperangkat lengkap nilai-nilai dan sikap mental yang menciptakan iklim yang cocok buat modernisasi. Untuk ini, pertama, pendidikan nasional harus memelihara jiwa inovatif pada murid-murid--hasrat untuk mencoba, untuk bereksperimen, untuk mencipta. Kemajuan tak pernah dibuat tanpa perubahan, melainkan dengan mengembangkan yang baru. Kedua, sekolah-sekolah dan masyarakat harus bekerjasama dalam mengembangkan jiwa kewiraswastaan yang baru. Sikap mental tradisional seperti mentalitet priyayi, yang memandang bekerja di kantor pemerintah paling cocok dan paling aman, harus diubah menjadi kesediaan untuk mengadu untung, untuk merintis usaha atas tanggungjawab sendiri jika pertumbuhan ekonomi hendak berjalan cepat. Ketiga, suatu sikap yang baik terhadap pekerjaan produktif, terhadap menjalankan pekerjaan teknis, dan terhadap memperoleh tangan kotor dalam proses penciptaan atau penemuan atau pembuatan, perlu diperbarui. Pekerjaan kantor melulu mustahil dapat membangun suatu Indonesia Baru.

Akhirnya diperlukan serangkaian sikap baru yang fungsional terhadap efisiensi bekerja serta disiplin jabatan dan terhadap pengangkatan dan promosi. Kompetensi fungsional dan prestasi harus menjadi ukuran yang dipakai untuk mengisi kedudukan-kedudukan kepemimpinan dalam masyarakat ekonomi modern, bukan kesetiaan famili atau golongan atau kesukuan. Tugas untuk mengubah sikap-sikap serupa itu adalah luar biasa beratnya. Mata-mata pelajaran akademis yang kersang di sekolah-sekolah tidak mempunyai banyak harapan akan dapat men-

jawab tantangan-tantangan itu. Pendekatan - pendekatan baru terhadap program pelajaran maupun suasana sekolah yang cocok harus ditemukan; dan masih merupakan pertanyaan apakah sekolah, sebagai hanya sub-sistem di dalam sistem sosial yang lebih besar, dapat diharapkan untuk menjalankan tugas seberat itu dengan sukses tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri.

Pendidikan untuk kesatuan nasional dan pembangunan politik

Sistem ekonomi suatu bangsa adalah alat yang perlu dan harus ada untuk mengusahakan kesejahteraan materiil bangsa itu dan untuk menjamin bahwa kondisi minimum yang mengijinkan penduduk hidup layak tercapai. Walaupun begitu maksud-maksud ekonomi daripada pendidikan--yaitu produksi tenaga kerja yang terampil dan pengembangan sikap ekonomi--tak akan dapat menggantikan tujuan-tujuan pendidikan dalam masyarakat yang demokratis, yaitu meluaskan pemahaman (sosial, moral, ilmiah) dan membantu manusia menjadi manusiawi (human), sehingga ia dapat menggunakan potensinya yang ia bawa sejak lahir, apakah spirituil, intelektual atau fisik.

Di negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya adalah penting bahwa setiap kemajuan dalam produktivitas ekonomi diikuti oleh perkembangan keterampilan dan pengetahuan politik serta cita-cita demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial, yang akan memungkinkan rakyatnya menjamin tidak saja pemerataan pendapatan keseluruhan rakyat tapi tersedianya secara sangat meluas keuntungan-keuntungan manusia dan sosial lain yang dimungkinkan oleh suatu ekonomi modern. Kebangsaan yang